

## DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang – undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- Fatwa Ketua Makamah Agung RI Nomor 37/ T4/ 88/ 66/ Pid tentang *Eksekusi terhadap Hukuman pembayaran uang pengganti*.
- Hadi, Sutrisna, J, 1978, *Protap Pengamanan Intern KPLP*, Depertemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
- Hamzah, Andi, 1984, *Korupsi Dalam Pengolahan Proyek Pembangunan*, Jakarta: CV Akademika Presindo.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT Pradya Paramita.
- Marpaung, Leden, 1992, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasir, JM, *Metode penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Poernomo, Bambang , 1993, *Asas – asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Ronny, H, 1990, *Metedologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji ,Sri, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Saleh, Wahtjik, 1983, *Tindak Pidana korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugandhi,R, 1980, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana*, Surabaya : Usaha nasional.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto d/a fakultas Hukum

Undip

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1988 tentang *Eksekusi Terhadap Hukuman Pembayaran Uang Pengganti*.

Surat Edaran Jaksa Agung RI No SE – 004/ JA/ 8/ 1988 tentang *Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti*.

Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

